

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2018**



**KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Limau Sundai, 2019

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : PESIRIS SELATAN
OPD : KECAMATAN BATANG KAPAS
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KERJA	KET
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional yang harus dilaksanakan OPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program nasional x 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan OPD sebanyak 3 program.	100%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian.LPNK	2	Keberadaan Standart Operating Procedure (SOP)		Apabila ada, sebutkan ada, sebanyak 17 : 1. SOP Pengajuan Cuti Pegawai 2. SOP Pengurusan Izin/Tugas Belajar 3. SOP Surat Keluar 4. SOP Kenaikan Pangkat PNS 5. SOP Kenaikan Gaji Berkala 6. SOP Pengajuan Pensiun PNS 7. SOP Perekamaman KTP-e 8. SOP Penerbitan Akta Tanah (Pusako rendah) 9. SOP Penerbitan Akta Tanah (Pusako tinggi) 10. SOP Penerbitan Rekomendasi SPj 11. SOP Pengantar SKCK 12. SOP Penertiban Surat Keterangan Izin Keramaian 13. SOP Pengantar Surat Keterangan Bersih Diri 14. SOP Penerbitan KTP Sementara 15. SOP Pengantar Surat Pindah/Datang dan KK 16. SOP Pengantar Surat Keterangan Kurang Mampu dan Dispensasi Nikah 17. SOP Pengantar Surat Rekomendasi SITU, IMB dan H	100%	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Jumlah Perda yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (Permen)	3.	Jumlah Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen	Jumlah Perda pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah perda yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100 %	- Perda pelaksanaan sebanyak 4 - Perda yang seharusnya sebanyak 6	67%	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian Struktur jabatan	4.	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang terisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 9 : 1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kasi Pemerintahan 4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Ekonomi 5. Kasi Kesejahteraan Sosial 6. Kasi Pelayanan 7. Kasi Trantibum 8. Kasubag Umum & Kepegawaian 9. Kasubag Perencanaan Keuangan & Pelaporan	100%	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KERJA	KET
			5.	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	- Apabila ada, sebutkan Nama Bidang / Jabatan Fungsional	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kopetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6.	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 17 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.044 orang	0.24%	
			7.	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim sebanyak 6 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	66.67%	
			8.	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 7 orang - Jabatan yang ada sebanyak 9 jabatan	77.78%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9.	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD : - Renstra OPD - Renja OPD - RKA OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada, sebanyak 3 jenis terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA OPD	3 dok	
		Sinkronisasi program Renja OPD dengan program OPD	10.	Jumlah Program OPD yang tidak diakomodir dalam Renja OPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam Renja OPD dibagi jumlah program dalam Renja OPD yang ditetapkan pada RPJM x 100 %	- Program OPD yang tidak diakomodir dalam Renja OPD sebanyak 0 program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 0 program	0%	
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan program Renja OPD	11.	Jumlah program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100 %	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKA OPD sebanyak 10 program - Program RKA OPD sebanyak 10 program	100%	
		Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran	12.	Jumlah program Renja OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program Renja OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100 %	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam DPA OPD sebanyak 10 program - Program dalam DPA OPD sebanyak 10 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13.	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi Anggaran OPD dibagi total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD sebesar Rp. 2.144.143.810.- - Total Belanja APBD sebesar Rp.-	 %	
		Besaran Belanja Modal	14.	Belanja Modal terhadap total belanja OPD	Belanja Modal dibagi total belanja OPD dikali 100 %	- Belanja Modal OPD sebesar Rp. 120.750.000.- - Total belanja OPD sebesar Rp. 2.144.143.810.-	5.63%	
		Besaran Belanja Pemeliharaan	15.	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa OPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan OPD sebesar Rp. ,- - Total belanja barang dan jasa sebesar RP. ,-		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KERJA	KET
			16.	Total belanja pemeliharaan dari total belanja OPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan OPD sebesar Rp. ,- - Total belanja OPD sebesar Rp. 2.144.143.810.-	1.87%	
		Laporan keuangan OPD	17.	Keberadaan Laporan Keuangan OPD (Neraca CALK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca CALK)	- Apabila ada, Laporan keuangan - Ada sebanyak 3 jenis, sbb : 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Sebanyak 3 Jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Asset OPD	18.	Keberadaan inventarisasi barang atau Asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau Asset OPD	Ada, Jenisnya : 1. Buku Inventaris barang 2. Kartu Inventaris ruangan 3. Rekapitulasi barang	Ada Ada Ada	
		Penggunaan Asset OPD	19.	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan - Asset yang dikuasai OPD sebanyak sebesar Rp. 1.385.009.886,64	0%	
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas prasarana partisipasi masyarakat	20.	Jumlah fasilitas prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Media Sosial Kecamatan FB : Kec Btang Kapas Ig : pesisirseltankec.batangkapas 2. Website OPD	Ada Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21.	Kerediaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak ada nya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak ada	Tidak Ada	

Batang Kapas, Januari 2019
CAMAT BATANG KAPAS

WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si
NBP. 19841008 200312 1 003

SKPD Pelaksana : Kecamatan Batang Kapas

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Rincian program dan kegiatan :

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Belanja Langsung										Tingkat Capaian (%)	
		Anggaran					Realisasi						
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total		
1	2											11	
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN											98.27	
I	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	73,450,000	166,972,000	-	7,500,000	247,922,000	73,350,000	161,409,420	-	7,500,000	242,259,420	97.72	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		9,000,000		7,500,000	16,500,000		7,346,220		7,500,000	14,846,220	89.98	
	2. Penyediaan Jasa Adminstras Keuangan	63,700,000				63,700,000	63,600,000				63,600,000	99.84	
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9,750,000	3,752,000			13,502,000	9,750,000	2,645,500			12,395,500	91.80	
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor		19,979,900			19,979,900		19,958,500			19,958,500	99.89	
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10,129,600			10,129,600		9,145,900			9,145,900	90.29	
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,297,500			2,297,500		2,112,500			2,112,500	91.95	
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2,880,000			2,880,000		2,880,000			2,880,000	100.00	
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman		21,400,000			21,400,000		21,365,000			21,365,000	99.84	
	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		38,850,000			38,850,000		37,427,800			37,427,800	96.34	
	10. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah		52,695,000			52,695,000		52,680,000			52,680,000	99.97	
	11. Penunjang Operasional		5,988,000			5,988,000		5,848,000			5,848,000	97.66	
II	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6,500,000	20,910,000	25,000,000	84,000,000	136,410,000	-	15,126,050	25,000,000	84,000,000	133,056,050	97.54	
	12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		-		39,300,000	39,300,000		-		39,300,000	39,300,000	100.00	
	13. Pe meliharaan Rutin Berkala/Rumah Dinas		1,000,000	3,000,000		4,000,000			3,000,000		3,000,000	75.00	
	14. Pe meliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			22,000,000	44,700,000	66,700,000		-	22,000,000	44,700,000	66,700,000	100.00	
	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	6,500,000	17,410,000			23,910,000	6,500,000	15,126,050			21,626,050	90.45	
	16. Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor		2,500,000			2,500,000			2,430,000		2,430,000	97.20	
III	PROG. PEMGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	-	37,975,000	-	-	37,975,000	-	37,975,000	-	-	37,975,000	100.00	
	17. Pelaksanaan Upacara HUT RI		37,975,000			37,975,000		37,975,000			37,975,000	100.00	
IV	Program Pendidikan Politik Masyarakat	-	4,750,000	-	-	4,750,000	-	4,750,000	-	-	4,750,000	100.00	
	18. Fasilitas Penyelenggaraan Pilwuna		4,750,000			4,750,000		4,750,000			4,750,000	100.00	
V.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	-	43,745,000	-	-	43,745,000	-	43,295,000	-	-	43,295,000	98.97	
	19. Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan		43,745,000			43,745,000		43,295,000			43,295,000	98.97	
VI.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	-	690,000	-	33,500,000	34,190,000	-	690,000	-	33,500,000	34,190,000	100.00	
	20. Penataan RTH		690,000		33,500,000	34,190,000		690,000		33,500,000	34,190,000	100.00	

VII.	PROG. PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA	-	12,850,000	-	-	12,850,000	-	12,850,000	-	-	12,850,000	100.00
	21. Pelaksanaan Festival Langkisau		12,850,000			12,850,000		12,850,000			12,850,000	100.00
VIII.	PROG. PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN	-	12,400,000	-	-	12,400,000	-	12,262,500	-	-	12,262,500	98.89
	22. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari		6,900,000			6,900,000		6,900,000			6,900,000	100.00
	23. Verifikasi Dan Evaluasi APB Nagari		5,500,000			5,500,000		5,362,500			5,362,500	
IX.	PROG. PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN	-	97,690,000	-	1,000,000	98,690,000	-	97,402,500	-	1,000,000	98,402,500	99.71
	24. Pembinaan PKK Kecamatan		71,382,500			71,382,500		71,350,000			71,350,000	99.95
	25. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong		6,395,000		1,000,000	7,395,000		6,395,000		1,000,000	7,395,000	100.00
	26. Perencanaan Pembangunan Kecamatan		8,352,500			8,352,500		8,352,500			8,352,500	100.00
	27. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan		6,760,000			6,760,000		6,760,000			6,760,000	100.00
	28. Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		4,800,000			4,800,000		4,545,000			4,545,000	94.69
X.	Program Pemantapan Otonomi Daerah	-	21,422,500	-	750,000	22,172,500	-	20,780,000	-	-	20,780,000	93.72
	29. Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan & UKS		11,935,000		750,000	12,685,000		12,550,000			12,550,000	98.94
	30. Fasilitasi Penyelesaian Tradibmas dan Konflik Pertanahan		9,487,500			9,487,500		8,230,000			8,230,000	86.75
	J U M L A H	79,950,000	419,404,500	25,000,000	126,750,000	651,104,500	73,350,000	406,540,470	25,000,000	126,000,000	639,820,470	98.27

B. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- Masih kurang tepatnya dalam perencanaan keuangan sehingga anggaran tidak terserap maksimal. Ini disebabkan karena adanya perubahan-perubahan sesuai dengan berjalannya waktu pelaksanaan

2. Solusi :

- Perlu nya perencanaan yang terarah dan terukur, dalam perencanaan penganggaran, sehingga target bulanan dapat tercapai secara maksimal

C. Hal-hal yang perlu dilaporkan :

-

D. REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA DAN REALISASI TAHUN 2018

No	SKPD /URUSAN	ANGGARAN					REALISASI				
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	JUMLAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	JUMLAH
1.	KECAMATAN BATANG KAPAS										
a.	Otonomi Daerah	79,950,000	419,404,500	25,000,000	126,750,000	651,104,500	73,350,000	406,540,470	25,000,000	126,000,000	639,820,470
	Total	79,950,000	419,404,500	25,000,000	126,750,000	651,104,500	73,350,000	406,540,470	25,000,000	126,000,000	639,820,470


 Januari 2019
CAMAT BATANG KAPAS
WENDRA ROVIKTO, S.STP. M.Si
 NIP. 19830119 200112 1 003

Form 2

SDM Pendukung Program dan Kegiatan :

**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2018**

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR								JENIS KELAMIN		GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
		NAMA JABATAN	STRUKTURAL	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
1.	WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si NIP. 1980119 200112 1 003	CAMAT	ESELON III	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	
2.	ZAINIL, S.Pt NIP.19630524 198603 1 004	SEKRETARIS KECAMATAN	ESELON III	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	
3.	JAYA YUMSI, S.Kom NIP. 19700828 200701 2 005	KASI PEM	ESELON IV	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	
4.	DASROL, SH NIP. 19620720 198602 1 003	KASI KESOS	ESELON IV	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	
5.	RAJA RATMAN, SE NIP. 19721027 200012 1 002	KASI PME	ESELON IV	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	
6.	SYAMSI KASIAN NIP. 19640915 198603 1 005	KASI PELAYANAN	ESELON IV	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
7.	SYAWALLUDIN,SH NIP. 19670415 198703 1 005	KASI TRANTIBUM	ESELON IV	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
8.	ROZA ADELINA, SH NIP. 19840615 200501 2 006	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	ESELON IV	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	
9.	YOGGI HARMAIDI, S.IP NIP. 19930302 201507 1 002	KASUBBAG PERENC, KEU & PEL	ESELON IV	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
10.	YULNITASASRIATI, S.IP NIP. 19720708 200701 2 005	BENDAHARA	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
11.	ISMAIZONDRA NIP. 19641220 198602 2 001	STAF	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	
12.	MASRIL, SH NIP. 19851105 200801 1 002	STAF	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
13.	SYAFRAN, SH NIP. 19610909 198203 1 007	WALI NAGARI	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
14.	BEN SUHANDRI, SH NIP. 19720418 199203 1 001	WALI NAGARI	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
15.	ULIL AMRI, S.Sos NIP. 19641220 201407 1 00	WALI NAGARI	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
16.	YULMALIZAR NIP. 19641220 198602 2 001	SEKRETARIS NAGARI	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
17.	LASDI PRASASTI NIP. 19851105 200801 1 002	SEKRETARIS NAGARI	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	

	TOTAL				4	-	-	-	12	1	14	3	-	2	14	1	-	-	-	6
--	-------	--	--	--	---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	----	---	---	---	---	---



Lima Puluh, Januari 2019

CAMAT BATANG KAPAS,

WENDY RUVIKTO, S.STP, M.Si

NIP. 1980119 200112 1 003